

BAB I

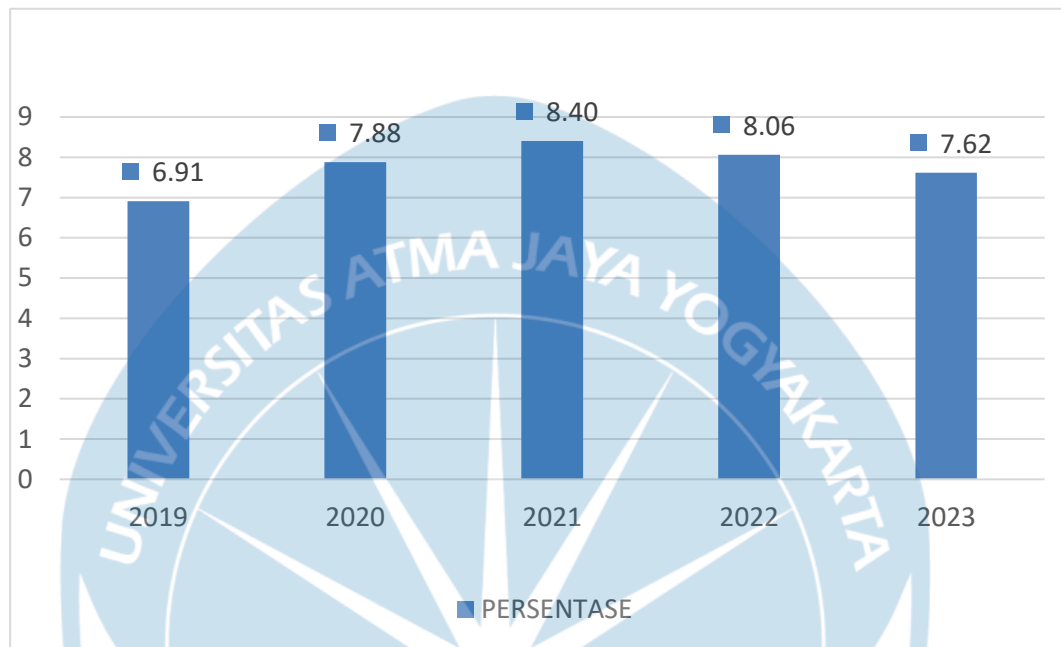
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Todaro & Smith (2011), kemiskinan dapat diartikan sebagai situasi di mana seseorang tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Kemiskinan dapat menyebabkan rendahnya tingkat hidup penduduk sehingga kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari menjadi terbatas, tidak sedikit penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan pendapatan yang rendah. Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan kelompok orang (Amelia, 2012).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Provinsi ini masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi meskipun memiliki banyak potensi ekonomi, seperti pertumbuhan industri dan investasi yang besar. Pada tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19 melanda, Indonesia mencatatkan tingkat kemiskinan yang relatif stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2019 mencapai 24,78 juta jiwa, dengan persentase kemiskinan sebesar 9,22%. Pada tahun ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk mengurangi angka kemiskinan, termasuk bantuan sosial dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan. Pandemi COVID-19 yang mulai menyebar pada awal tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi dan

sosial masyarakat. Banyak sektor ekonomi yang terpuruk, menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan penurunan pendapatan masyarakat.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

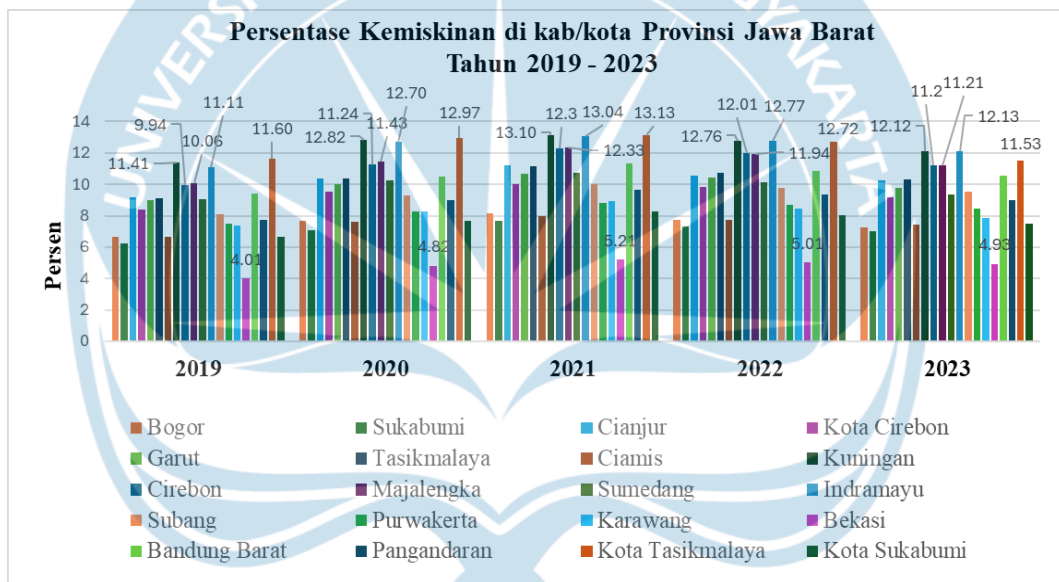
Gambar 1. 1

Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.1 di atas menggambarkan dinamika persentase penduduk miskin di Jawa Barat selama lima tahun terakhir, dari 2019 hingga 2023. Pada awal periode, tahun 2019 mencatatkan angka kemiskinan terendah yaitu 6,91%. Namun, situasi berubah drastis pada tahun 2020 dan 2021, di mana persentase penduduk miskin mengalami lonjakan signifikan, mencapai puncaknya di 8,40% pada tahun 2021. Kenaikan ini kemungkinan besar merupakan dampak dari krisis pandemi *COVID-19* yang mengguncang berbagai aspek kehidupan. Setelah mencapai titik tertinggi, terlihat adanya tren penurunan pada tahun 2022 dan 2023, dengan angka kemiskinan masing-masing menjadi 8,06% dan 7,62%. Meskipun demikian, angka pada tahun

2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Secara keseluruhan, perjalanan angka kemiskinan di Jawa Barat dalam periode ini mencerminkan betapa besar pengaruh peristiwa global seperti pandemi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, diikuti oleh upaya pemulihan yang mulai menunjukkan hasil positif pada tahun-tahun berikutnya.

Berikut juga menampilkan persentase tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Gambar 1. 2

Persentase Kemiskinan di kab/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

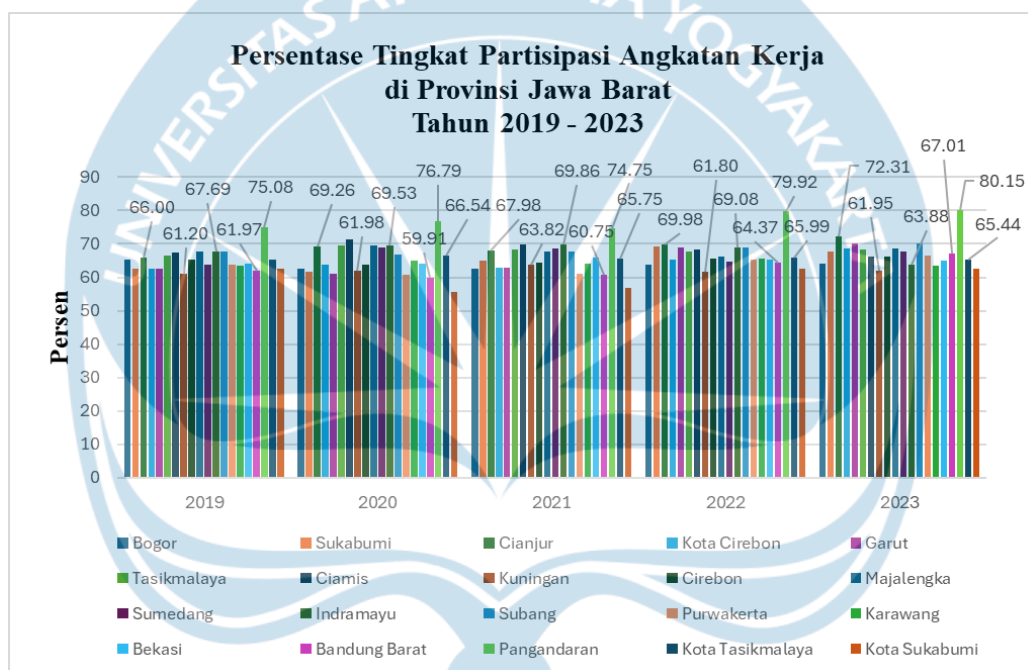
Gambar 1.2 di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2019 sebelum pandemi, kemiskinan di Jawa Barat relatif terkendali. Kabupaten/kota dengan angka kemiskinan tertinggi adalah kota Tasikmalaya 11,60 %, Kuningan 11,41% dan yang terendah adalah Bekasi 4,01%. Memasuki tahun 2020 terjadi lonjakan yang signifikan akibat gangguan ekonomi selama pandemi. Kota Tasikmalaya menjadi

urutan yang pertama 12,97%, di urutan kedua ada Kuningan 12,82%. Bekasi mengalami kenaikan menjadi 4,82% , namun masih tetap menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan paling rendah. Pada tahun 2021, beberapa kabupaten mencatat puncak kemiskinan tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu kota Tasikmalaya 13,13%, Kuningan 13,10%, Indramayu 13,04, dan Bekasi mengalami kenaikan menjadi 5,21%. Tahun 2022 menandai dimulainya pemulihan ekonomi, tercermin dari penurunan kemiskinan di beberapa daerah yaitu Indramayu 12,77%, Kuningan 12,76%, Kota Tasikmalaya 12,72%, dan Bekasi 5,01%. Meski masih cukup tinggi, angka ini menunjukkan adanya perbaikan. Pada tahun 2023, meskipun penurunan kemiskinan tidak terlalu drastis, beberapa daerah menunjukkan perbaikan lebih lanjut. Indramayu 12,13%, Kuningan 12,12%, Kota Tasikmalaya 11,53% dan Bekasi 4,93%. Selama 2019 – 2023, Bekasi menjadi kabupaten yang tingkat kemiskinan nya paling rendah, ini menandakan konsistensi daerah tersebut dalam mempertahankan kestabilan ekonomi.

Angkatan kerja adalah penduduk yang berada pada usia kerja yang bekerja, memiliki pekerjaan namun sedang tidak bekerja (cuti, sakit, dsb), maupun pengangguran. TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) memperlihatkan sebuah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang secara aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja baik yang tengah mencari pekerjaan maupun yang bekerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) bisa dinyatakan untuk semua tenaga kerja yang tersedia atau jumlah tenaga kerja berdasarkan suatu kelompok desa-kota, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin (Rahmani, 2021 dalam jurnal Sianturi et al., n.d.). Masyarakat yang memasuki usia kerja serta aktif pada kegiatan ekonomi dapat

ditunjukkan melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari waktu ke waktu. Semakin tinggi persentase TPAK menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang berkontribusi dalam kegiatan perekonomian dan kesempatan kerja yang semakin luas.

Berikut menampilkan persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023:



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

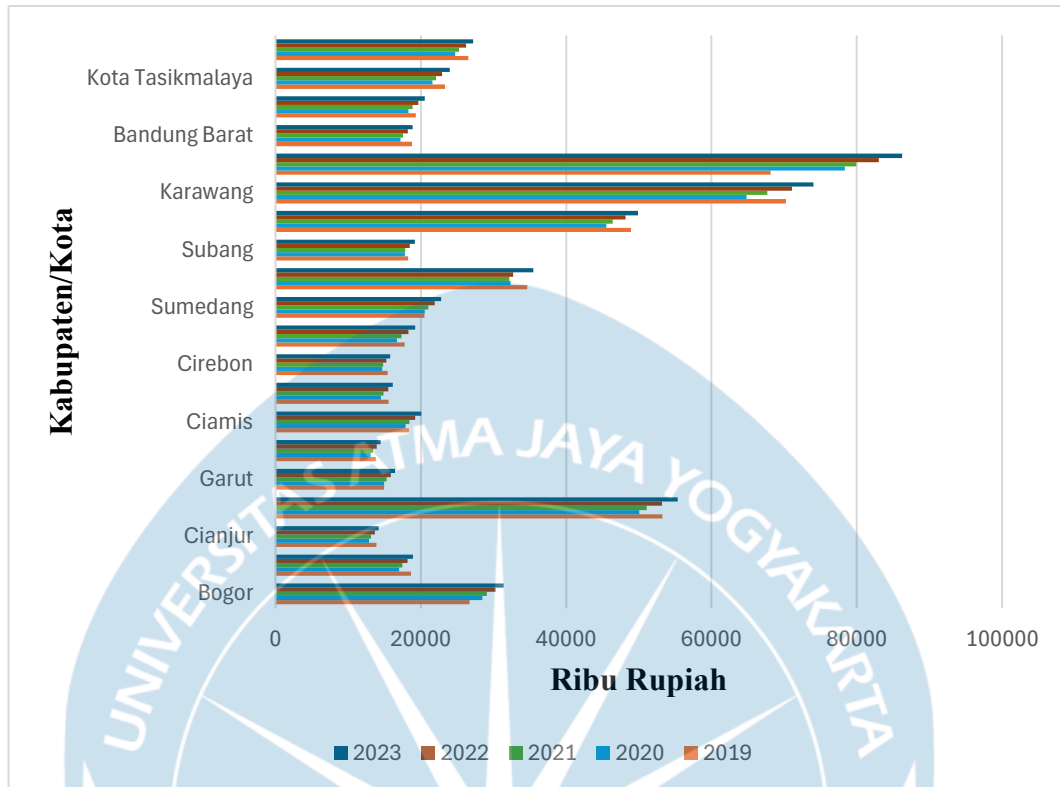
Gambar 1. 3

Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di kabupaten/kota provinsi

Gambar 1.3 menunjukkan perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2019 hingga 2023. TPAK menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Sejak tahun 2019-2023, Pangandaran merupakan kabupaten yang TPAK nya paling

tinggi dan cenderung mengalami kenaikan meskipun tahun 2021 mengalami penurunan karena dampak pandemi COVID-19. Di ikuti dengan kabupaten Indramayu 67,69 % (2019), 69,53 % (2020), 69,86 % (2021) serta kabupaten Cianjur 69,98 % (2022), 72,31 % (2023). Sebaliknya beberapa kabupaten yang cenderung memiliki TPAK yang rendah yaitu Kuningan dan Indramayu. Pada tahun 2019,2022,2023 TPAK kabupaten kuningan (61,20%),(61,80%),(61,95%). Lalu pada tahun 2020 dan 2021 berapa diposisi kabupaten Bandung Barat (59,91%), dan (60,75%).

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, memiliki dinamika yang kompleks terkait tingkat kemiskinan. Meskipun secara makroekonomi menunjukkan perkembangan yang positif dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita setiap tahunnya, distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi sering kali tidak merata. Ketimpangan sosial dan ekonomi di Jawa Barat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi ini. Berikut menampilkan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023:



Sumber : BPS, Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Gambar 1.4

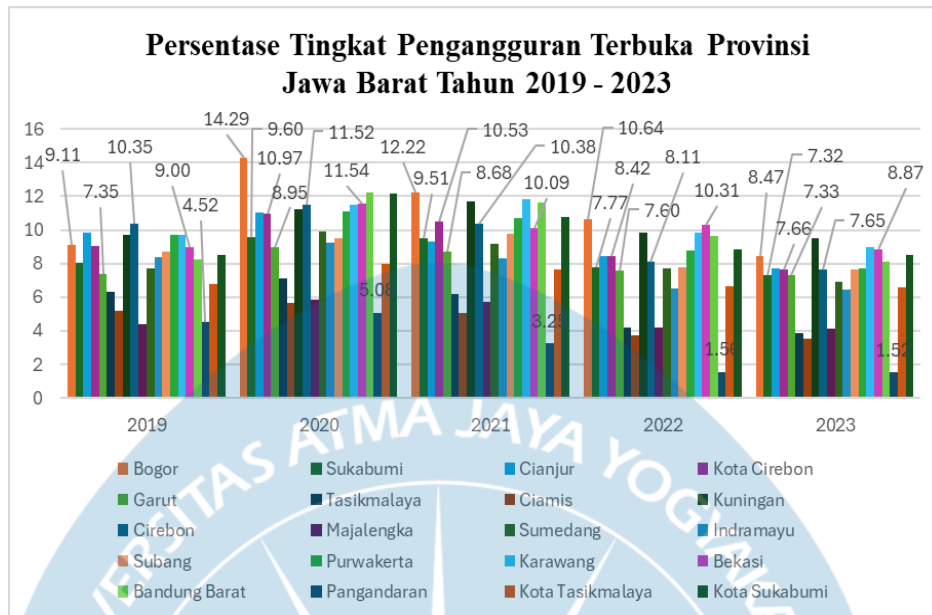
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan di kabupaten/kota provinsi

Gambar 1.4 di atas tersebut menjelaskan perkembangan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 hingga 2023. Secara umum, gambar ini memperlihatkan adanya tren peningkatan PDRB per kapita di hampir seluruh wilayah dari tahun ke tahun. Daerah-daerah seperti Bekasi dan Karawang tampak menonjol dengan PDRB per kapita yang sangat tinggi pada tahun 2023.

Menurut BPS, kata “pengangguran” mengacu pada mereka yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari seminggu, atau sedang dalam proses mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran menjadi isu yang signifikan di Jawa Barat. Dengan jumlah angkatan kerja yang

besar, ketidakmampuan pasar tenaga kerja untuk menyerap tenaga kerja secara optimal menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran. Pengangguran, terutama pada kelompok usia produktif, berdampak langsung pada ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan.

Periode tahun 2019-2023 merupakan periode yang krusial untuk menganalisis dampak pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Tahun 2019 menjadi representasi kondisi pra-pandemi *COVID-19*, di mana aktivitas ekonomi berjalan relatif normal. Namun, dengan merebaknya pandemi pada awal tahun 2020, terjadi guncangan ekonomi yang dahsyat. Banyak perusahaan terpaksa mengurangi produksi, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), atau bahkan menutup usahanya, yang mengakibatkan lonjakan angka pengangguran secara signifikan. Sektor-sektor seperti pariwisata, transportasi, dan UMKM menjadi yang paling terpuak, menyebabkan hilangnya banyak pekerjaan dan sumber pendapatan masyarakat. Berikut menampilkan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023:



Sumber : BPS, Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Gambar 1. 5

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.5 di atas menunjukkan perkembangan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 dua daerah dengan TPT tertinggi adalah Cirebon dan Bogor. Tahun 2020 menjadi puncak covid sehingga semua daerah mengalami kenaikan TPT, yang paling tinggi adalah Bogor 14,27 %. Pada tahun 2021 sampai 2023, setiap daerah di provinsi Jawa Barat sudah mengalami penurunan TPT. Pangandaran menjadi daerah yang TPT nya selalu paling rendah dari daerah lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap kemiskinan

di Jawa Barat tahun 2019- 2023?

2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto perkapita terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2019- 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis PDRB perkapita terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Pemerintah, sebagai salah satu bahan referensi dalam mengeluarkan kebijakan.
2. Peneliti / Pembaca, sebagai bahan referensi dan pembanding studi / penelitian yang terkait.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan

didas, maka dapat disusun suatu hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2019 – 2023
2. Diduga variabel PDRB perkapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2019 – 2023
3. Diduga variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2019 – 2023

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan kemiskinan, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, data dan sumber data, definisi operasional variabel, kerangka pemikiran konseptual, alat analisis, model teoritis, tahapan analisis data, tahapan pemilihan model.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data, hasil analysis data dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran.

